

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR GAMBAR	6
PRAKATA: OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA.....	7
A. Pengertian Omnibus Law.....	7
B. Langkah Pembuatan.....	7
C. Rancangan Undang-undang	8
D. Kodifikasi Terbatas Kementerian/Lembaga	12
BAB I : PENDAHULUAN	13
A. Pengertian dan Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan	13
B. Hakikat dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan	23
BAB II : HUBUNGAN KERJA DAN NORMA KERJA	26
A. Perjanjian Kerja	26
1. Pengertian.....	26
2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	29
a. Pekerjaan yang Sekali Selesai atau yang Sementara Sifatnya	30
b. PKWT untuk Pekerjaan yang Sekali Selesai atau Sementara Sifatnya yang Penyelesaiannya Paling Lama 3 (tiga) Tahun.....	31
c. PKWT untuk Pekerjaan yang Bersifat Musiman	31
d. PKWT untuk Pekerjaan yang Berhubungan dengan Produk Baru.....	31
e. Perjanjian Kerja Harian atau Lepas	32
3. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu	32
4. Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus..	33
B. Peraturan Perusahaan	34
1. Definisi	34

2. Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan	34
3. Tata Cara Pengesahan	37
4. Isi Peraturan Perusahaan	39
5. Jangka Waktu	39
6. Kewajiban Para Pihak	40
C. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	40
D. Pembinaan Norma Kerja	50
1. Pengertian Norma	50
2. Jenis-jenis Norma	50
3. Norma Hukum Ketenagakerjaan	51
BAB III : PERLINDUNGAN TENAGA KERJA	53
A. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	53
B. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	58
1. Jaminan Kecelakaan Kerja	59
2. Jaminan Kematian	59
3. Jaminan Hari Tua	60
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	60
5. Kepesertaan	61
6. Iuran	62
7. Badan Penyelenggara	62
C. Cuti	63
1. Cuti Besar dan Tahunan	63
2. Cuti Melahirkan	65
3. Kesempatan Menyusukan Anak	66
4. Cuti Haji	66
5. Cuti Haid	66
D. Penghapusan Perbedaan Perlakuan Terhadap Tenaga Kerja Wanita	67
E. Perlindungan Upah	68
F. Waktu Kerja Lembur dan Upah Lembur	72
G. Upah Minimum	74
H. Struktur dan Skala Upah	78
I. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	81

BAB IV : HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA	90
A. Hubungan Industrial	90
B. Kebijakan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	94
1. Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial	94
2. Penyelesaian Melalui Bipatrit	95
3. Penyelesaian Melalui Mediasi	97
4. Penyelesaian Melalui Konsiliasi	102
5. Penyelesaian Melalui Arbitrase	106
6. Penyelesaian Melalui Pengadilan Hubungan Industrial	117
C. Pemutusan Hubungan Kerja	130
1. Pengertian PHK	130
2. Tata Cara PHK	131
3. Larangan PHK	132
4. PHK Karena Kesalahan Berat	133
5. PHK Karena Ditahan Pihak yang Berwajib	134
6. PHK Karena Melanggar Perjanjian Kerja Bersama/ Peraturan Perusahaan	135
7. PHK Karena Sebab Lain	136
8. PHK Karena Mangkir Kerja	138
9. PHK Karena Sakit Berkepanjangan	138
10. PHK Karena Menggugat Pengusaha	139
11. PHK Karena Mengundurkan Diri	139
12. Hak Keberatan Atas PHK	140
D. Pesangon	140
1. Pengertian	140
2. Perhitungan Pesangon	142
BAB V : PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	144
A. Peranan Pengawas Ketenagakerjaan	144
1. Pengertian	144
2. Konvesi ILO	146
3. Ruang Lingkup Pengawasan	148

4. Prinsip-prinsip Pengawasan Ketenagakerjaan	149
5. Kewajiban Pengawas Ketenagakerjaan	150
6. Kekuasaan Pengawas Ketenagakerjaan	151
B. Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu	154
C. Konvensi ILO	160
1. Konvensi No 129 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Pertanian	161
2. Konvensi No 81 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan	161
BAB VI : OUTSOURCING	175
A. Pengertian Outsourcing	175
B. Persyaratan Outsourcing	178
C. Mahkamah Konstitusi dan Outsourcing	180
D. Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	180
BAB VII : HAK BURUH DAN HAK PERUSAHAAN	184
A. Serikat Pekerja	184
1. Pengertian	184
2. Hak Membentuk Serikat Pekerja.....	185
3. Pembentukan Serikat Pekerja	185
4. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.....	186
5. Keanggotaan.....	187
6. Pemberitahuan dan Pencatatan	188
7. Hak dan Kewajiban	193
8. Keuangan dan Harta Kekayaan	195
9. Pembubaran.....	196
10. Penyelesaian Perselisihan.....	198
11. Ketentuan Larangan.....	199
12. Ketentuan Sanksi	199
B. Mogok Kerja	200
1. Tata Cara dan Persyaratan Mogok	201
2. Prosedur Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan (lock out)	204

3. Larangan Menghalangi Mogok.....	206
4. Hak Pekerja/Buruh Selama Mogok	207
C. Lock Out (Penutupan Perusahaan)	207

BAB VIII : ORGANISASI PERBURUHAN	210
---	------------

A. ILO	210
B. Perkembangan Organisasi Buruh Indonesia	214

BAB IX : PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING	226
---	------------

A. Pengertian	226
B. Tata Cara Permohonan Pengesahan RPTKA	227
C. Izin Tertulis	236
D. Jabatan dan Waktu Tertentu	236
E. Rencana Penggunaan	236
F. Personalia	237
G. Bentuk Permohonan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	238

DAFTAR PUSTAKA	243
-----------------------------	------------

INDEKS	247
---------------------	------------

RIWAYAT HIDUP PENULIS	251
------------------------------------	------------